

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konflik yang terjadi di Indonesia sekarang ini bukan lagi menjadi hal yang luar biasa, konflik tidak hanya terjadi dalam lingkup keluarga secara pribadi, melainkan sudah menjelajah pada tingkat nasional. Di setiap segi-segi kehidupan manusia hampir selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik didalamnya. Konflik bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti misalnya dari segi internal maupun eksternal dari individu-individu maupun dalam kelompok-kelompok tertentu (badan/instansi/organisasi), selalu ada hal yang dapat memicu terjadinya konflik. Pada Harian Umum Suara Pemabharuan, Letjen (Pur) Kiki Syahnakri menggambarkan bahwa sumber-sumber konflik yang terjadi di Indonesia setidaknya terdiri dari lima faktor, antara lain: ideologi/agama, politik, ekonomi, antar-etnis, dan separatisme (Syanakri, 2004). Dari inventarisasi Panitia Pengawas Pemilu menyebutkan, setidaknya terdapat tujuh daerah yang rawan konflik di Indonesia. Di antaranya adalah kawasan Pantura, daerah "tapal kuda" di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kota Surakarta (Jawa Tengah), Kalimantan, Jawa Timur, dan Jakarta (Tempo 2/9). Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang dipetakan sebagai daerah yang berpotensi memiliki konflik tersebut, terutama konflik politik dan ekonomi.

Meskipun selama ini Jawa Timur dipetakan sebagai daerah rawan konflik, hasil pengamatan selama ini Jawa Timur tidak menunjukkan eskalasi konflik sampai pada tingkat tertinggi yaitu tindakan anarkis massa yang berakibat pada lumpuhnya kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Bahkan bila dibandingkan dengan di Jawa Tengah dan Jakarta di tahun 1997/1998, kondisi di Jawa Timur lebih kondusif dan hampir tidak terjadi kegiatan pembakaran. Kemudian dalam pemilihan gubernur di Jawa Timur tahun 2008 yang berlangsung sampai tiga kali saja misalnya, dapat dilihat bahwa kondisi masyarakat Jawa Timur relatif aman, dalam artian proses pemilihan yang panjang ini tidak sampai menimbulkan konflik horizontal seperti daerah Maluku Utara, Sulawesi Selatan. Munculnya ketenangan warga, situasi kondusif, dan potensi konflik yang ada dan tidak menimbulkan masalah ini tentunya tidak muncul tanpa alasan. Namun dalam hal ini warga masyarakat dipandang memiliki suatu kekutan tersendiri dalam komunitas masyarakat yang mana mampu mengeratkan seluruh lapisan warga didalamnya. Pada penelitian ini modal sosial dipandang sebagai modal yang diduga mampu meredam dan mereduksi konflik politik yang ada di masyarakat Jawa Timur. Jadi pada intinya konflik yang terjadi di Jawa Timur dapat disimpulkan berada dalam keadaan yang stabil. (Suryanto, dkk., 2009)

Melihat adanya keadaan yang stabil dalam lingkup luas masyarakat Jawa Timur pada penelitian sebelumnya (Suryanto, dkk., 2009), penulis kemudian mencoba melakukan penelitian lanjutan dengan memfokuskan pada salah satu wilayah di Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya dengan segala karakteristik pembentuk kota disinyalir sebagai daerah yang rawan konflik. Surabaya

merupakan satu wilayah kota yang terletak di Jawa Timur yang terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Selain itu Surabaya juga merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Selain beragam pusat perkantoran besar yang berdiri megah, kota Surabaya juga merupakan area perbelanjaan yang cukup lengkap di Jawa Timur, terbukti dengan semakin banyaknya mall-mall pusat perbelanjaan yang berdiri di kota Surabaya. Dengan uraian tersebut layak jika Surabaya disebut sebagai kota besar. Selain itu Surabaya dikenal pula sebagai kota multi etnis yang kaya akan budaya, hal tersebut terkait dengan letak geografis kota Surabaya sebagai pemukiman pantai yang menjadikan Surabaya berpotensi sebagai tempat persinggahan dan permukiman bagi kaum pendatang (imigran). Beragam migrasi yang datang, singgah dan juga menetap, hidup bersama serta membaaur dengan penduduk asli, membentuk pluralisme budaya yang kemudian menjadi ciri khas Kota Surabaya (<http://ciptakarya.pu.go.id>). Dengan luas wilayah 374,36 km² dan jumlah penduduk yang mencapai 3 juta jiwa, suku mayoritas yang tinggal di kota Surabaya adalah suku Jawa (83,68%), namun Surabaya juga menjadi tempat tinggal berbagai suku bangsa di Indonesia, termasuk [suku Madura](#) (7,5%), [Tionghoa](#) (7,25%), [Arab](#) (2,04%), dan sisanya merupakan suku bangsa lain (id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya).

Predikat Surabaya sebagai kota besar secara otomatis menjadikan Surabaya sebagai sentralisasi pemerintahan pada wilayah Jawa Timur. Segala bentuk urusan politik di Jawa Timur banyak yang berpusat di Surabaya termasuk sebuah organisasi kepartaian. Dalam beberapa pelaksanaan kegiatan politik baik internal maupun eksternal, Surabaya dianggap mempunyai potensi cukup besar munculnya konflik. Berikut ini merupakan beberapa uraian konflik yang sempat terjadi di Surabaya baru-baru ini, antara lain:

1. Perselisihan yang terjadi dalam kubu internal PKB dalam perjalanannya sebagai organisasi beberapa kali sempat terjadi dualisme kepengurusan. Dahulu di samping kepemimpinan PKB di bawah pengaruh Gus Dur, ada PKB Matori Abdul Djilil. Di lain waktu, ada pula PKB Alwi Shihab, dan kini yang terbaru yakni PKB Muhaimin Iskandar. Konflik Gus Dur dengan Muhaimin bermula dari pemecatan Muhaimin dari kursi Ketum PKB. Konflik ini berlanjut ke pengadilan dan dimenangkan oleh Muhaimin sehingga dinyatakan sebagai pihak yang berhak mengikuti Pemilu 2009. (sumber: <http://ligagame.com>)
2. Konflik internal yang sempat terjadi dalam kubu partai PDIP terkait turunnya rekomendasi calon wali kota Surabaya yang jatuh pada Risma-Bambang pada pilwali Surabaya 2010. Konflik muncul karena rekomendasi tidak turun pada pasangan Saleh Mukadar-Bambang DH sebagaimana hasil rapat kerja cabang khusus (rakercabsus) DPC PDIP Surabaya. Bahkan sebelumnya terdapat 22 PAC yang berencana memboikot golput dalam Pilkada Surabaya tersebut. Namun kemudian

konflik segera teratasi dengan mengambil kesepakatan utama untuk akhirnya solid mendukung pasangan Risma-Bambang. (sumber: <http://antaranews.com>).

3. Kasus gugatan pasangan pilwali Arif Afandi-Adies Kadir (Cacak) dari kubu Partai Demokrat ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas kemenangan pasangan Risma-Bambang (Ridho) dari kubu PDIP pada pilwali yang digelar pada 7 Juni 2009. Tim advokasi Cacak meminta untuk dilaksanakan perhitungan ulang karena surat suara coblos tembus dinyatakan tidak sah, sedangkan pada Surat Edaran KPU nomor 313/KPU/V/2010 menyatakan bahwa coblos tembus ke bagian lain surat suara tetap dinyatakan sah, asalkan tembusannya tidak mengenai kolom pasangan lain. Pada kasus tersebut pasangan Cacak merasa dirugikan karena adanya kemungkinan surat suara yang dianggap tidak sah tersebut adalah suara untuk Cacak. (Sumber: <http://ruangberita.com>).

Beberapa uraian singkat kasus-kasus di atas hanya merupakan sebagian gambaran nyata konflik politik yang terjadi di kota Surabaya, disamping itu masih banyak konflik politik yang biasa terjadi di Surabaya seputar kegiatan politik.

Melihat dari data jumlah penduduk, keberanekaragaman suku bangsa yang tinggal di kota Surabaya, serta segala aktivitas kehidupan yang berjalan di kota Surabaya, maka dari data-data fakta tersebut di atas maka Surabaya dapat dikategorikan sebagai daerah yang rawan konflik, terlebih jika menyinggung masalah konflik politik, Surabaya mempunyai potensi yang cukup besar.

Pada pemilihan walikota Surabaya yang baru-baru ini, walaupun diselengi oleh perseteruan antara kubu pemenang dan kubu yang kalah namun hal lain yang dapat dilihat adalah bagaimana seluruh warga Surabaya telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Kekhawatiran sebagian orang yang menduga bahwa kerusuhan sosial di Mojokerto dapat menjalar ke Surabaya akibat sentimen ideologi dan kepentingan politik ternyata tidak terjadi. Warga Surabaya dianggap mampu melakukan pesta demokrasi dengan cara yang sangat beradab. (<http://www.jawapos.co.id/metropolis/index>)

Dengan adanya karakteristik-karakteristik pembentuk Kota Surabaya seperti digambarkan di atas serta keberagaman masyarakat Surabaya sendiri yang multikultural, yang mana masyarakat Surabaya tumbuh dan berkembang dalam keberagaman individu-individu di dalamnya, perbedaan menjadi suatu hal yang nyata dalam masyarakat. Batimang (2005) memaparkan faktor yang menyebabkan timbulnya konflik salah satunya disinyalir karena adanya perbedaan budaya. Seperti terjadinya konflik antar etnis di Sambas Kalimantan Barat karena perbedaan budaya. Orang-orang Madura di Sambas tinggal berdampingan dengan Dayak. Orang Madura dengan orang Dayak melakukan interaksi sosial, namun tidak terjadi akulturasi budaya. Sama halnya dengan kota Surabaya, predikat multikultural disinyalir mampu memunculkan potensi konflik dalam masyarakat.

Fukuyama dalam bukunya "Trust" mendefinisikan bahwa modal sosial (*social capital*) sebagai norma informal yang dapat mendorong kerjasama antar anggota masyarakat. Dari definisi ini Fukuyama melihat bahwa aspek kerjasama

(*cooperation*) menjadi unsur penting dalam berusaha. Untuk bekerjasama diperlukan kepercayaan diantara anggota kelompok yang bekerjasama. Oleh karena itu kepercayaan atau (*trust*) menjadi syarat yang mutlak. Bagaimana orang bisa kerjasama bila tidak didasari oleh sifat ini. Pada kesempatan lainnya, Putnam (1995) melihat modal sosial sebagai fitur kehidupan sosial. Fitur ini terdiri dari jejaring (*networks*), norma (*norms*) kepercayaan (*trust*) yang mampu menggerakkan partisipasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Disamping itu, Lin (2001) mencoba membedakan konsep antara modal sosial dengan jaringan sosial (*social networks*). Dalam definisinya tentang modal sosial, ia menjelaskan bahwa modal sosial adalah sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial dan digunakan oleh para pelakunya untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebagai suatu modal dalam penyelesaian konflik, modal sosial yang berupa kepercayaan (Fukuyama,) jaringan sosial dan norma (Putnam,1995) serta adanya sumberdaya yang melekat dalam jaringan sosial (Lin, 2001) akan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik politik di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan modal sosial dan penyelesaian konflik politik di masyarakat Surabaya. Dipilihnya Surabaya sebagai lokasi penelitian karena di wilayah ini sudah membuktikan kecilnya konflik politik yang berakibat anarkisme walaupun potensi untuk terjadinya konflik horizontal sangat terbuka lebar. Seperti diketahui bahwa dalam konteks pluralitas Surabaya layak disebut Indonesia mini. Pluralitas etnik, agama, dan budaya

terjadi di Surabaya. Jika dilihat secara positif, pluralitas akan menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam membangun Kota Surabaya.

Modal sosial dalam masyarakat Surabaya menjadi suatu kajian yang menarik untuk diteliti karena konsep modal sosial dalam hal ini dipandang sebagai salah satu bentuk kekuatan yang ada dalam masyarakat yang mana dengan keberadaan modal sosial dalam masyarakat tersebut dinilai mampu mengatasi konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan resolusi cara damai sehingga konflik yang terjadi dapat teredam dan persatuan masyarakat Surabaya pun dapat dicapai

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar permasalahan di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam fokus pengidentifikasian modal sosial masyarakat Surabaya dalam upaya menyelesaikan konflik politik di masyarakat dengan melalui beberapa alur pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pola konflik politik di masyarakat Surabaya?
- b. Bagaimanakah pola penyelesaian konflik politik masyarakat Surabaya?
- c. Modal sosial apakah yang menjadi model penyelesaian konflik politik di Surabaya?
- d. Bagaimanakah modal sosial yang ada dikembangkan dan disosialisasikan ke dalam masyarakat Surabaya?

1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Ada banyak sekali penelitian yang mengambil keterkaitan dengan modal sosial dalam penyelesaian konflik, namun lebih banyak berfokus pada permasalahan sosial seperti, etnis, agama, dan juga SARA.

Misalkan saja penelitian yang dilakukan oleh Lokollo, J.E (dalam Agus, 2007), mengenai “Kerusuhan di Maluku: Beberapa Masalah dan Kaitannya dengan Ketahanan Nasional”. Hasil penelitian tersebut membuahkan rekomendasi bentuk solusi alternatif, yakni perlunya : (1) Peningkatan hubungan-hubungan dialogis lintas SARA dengan mengadakan forum dialog. (2) Redefinisi dan revitalisasi peran dan fungsi institusi adat. Diperlukan pula legitimasi formal bagi institusi-institusi adat. (3) Diperlukan kebijakan kriminal pemerintah (di daerah) yang dimaksudkan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat, seperti norma hukum, norma agama, adat dan kebudayaan. (4) Perlu dibutuhkan kebijakan pemerintah mengenai kependudukan dan penataan ruang untuk pengendalian arus urbanisasi dan migrasi. (5) Perlunya ketentuan-ketentuan dan peluang berusaha yang memperhatikan aspek-aspek pemerataan, keadilan, kesetaraan, tanpa berpihak pada kelompok manapun, dari segi etnis, agama, maupun ras. (6) Perlunya pembinaan dibidang kemasyarakatan terutama penanaman kesadaran, jiwa, semangat dan wawasan kebangsaan melalui kebijakan-kebijakan terpadu dengan melibatkan kepolisian, TNI, komponen masyarakat, agama dan pemuda. (7) Diperlukan upaya sosialisasi kesadaran bela negara dalam keluarga, lingkungan desa atau kota, wilayah melalui jalur pendidikan formal dan informal.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pendekatan modal sosial dapat digunakan sebagai alternatif solusi sebagai perekat sosial dalam upaya menyelesaikan konflik sosial. Berbeda dengan penelitian di atas, pada penelitian ini memiliki beberapa pertimbangan yang membuat peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini. Pertimbangan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Penelitian ini difokuskan pada permasalahan konflik politik.
- 2) Dilihat dari segi sejarah Kota Surabaya yang adalah ibukota Jawa Timur sebagai daerah wilayah ‘tapal kuda’, kasus-kasus konflik politik di Surabaya cukup tinggi dan beragam.
- 3) Surabaya merupakan kota metropolis kedua terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk hampir mencapai 3 juta jiwa dengan beragam suku maupun agama berpotensi besar terhadap munculnya konflik.
- 4) Surabaya dipetakan sebagai daerah yang rawan konflik (Suryanto, dkk., 2009).
- 5) Banyak potensi konflik, namun yang sempat muncul tidak sampai menimbulkan anarkisme yang berlebihan.
- 6) Belum ada model penanganan masalah konflik politik yang dikaji secara ilmiah berdasarkan pada modal sosial masyarakat setempat.

1.4. Tujuan Penelitian.

Selain untuk menjawab pertanyaan yang dijabarkan pada fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mengidentifikasi modal-modal sosial yang ada di masyarakat kota Surabaya sebagai gambaran kota besar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik politik di kota Surabaya.

1.5. Manfaat Penelitian.

Hasil dari penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan bidang psikologi dalam upaya pengembangan model penyelesaian konflik politik di masyarakat khususnya pada masyarakat kota Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya dengan mendasarkan pada modal sosial yang ada sehingga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dapat dicapai.
2. Manfaat Praktis, pada penelitian-penelitian terdahulu belum ada model penanganan masalah konflik politik yang dikaji secara ilmiah berdasarkan pada modal sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu dengan penelitian ini, dengan mengidentifikasi modal-modal sosial yang ada di masyarakat Surabaya diharapkan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik politik di kota surabaya